

Siaran Pers

GROWTH DIAGNOSTICS, A NEW APPROACH TO NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES: IDENTIFYING THE BINDING CONSTRAINT TO GROWTH IN INDONESIA (EARLY FINDINGS)

Jakarta, 12 Desember 2017 – Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Australia menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “***Growth Diagnostics, A New Approach to National Development Strategies: Identifying the Binding Constraint to Growth in Indonesia (Early Findings)***”, dengan pembicara Professor Ricardo Hausmann, Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat. Selain sebagai profesor, beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur pada Center for International Development di lembaga yang sama. Sebelumnya, Prof. Ricardo Hausmann pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Venezuela dan menjadi anggota dewan Bank Sentral Venezuela. Selain memberikan kuliah umum, selama di Indonesia, Prof. Ricardo Hausmann juga akan membagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki kepada para pegawai instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan melalui *workshop* mengenai pendekatan *growth diagnostics* yang diikuti oleh 55 pegawai instansi pemerintah, terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga riset.

Dalam sambutan pembuka, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan bagian dari persiapan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. “Indonesia masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih dari enam persen, untuk menjadi negara maju dalam dua puluh tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pekerja baru dan mengurangi jumlah orang miskin yang saat ini jumlahnya masih 27 juta orang,” ujar beliau.

Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan pada kisaran lima persen dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang stagnan ini juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi potensial, sebuah konsep yang menggambarkan kapasitas produktif suatu negara. Berdasarkan perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia pada 2016, berada di kisaran 5,0–5,3 persen. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang tepat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial kembali ke kisaran enam persen.

Dalam upaya mencari format reformasi kebijakan yang tepat, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan studi awal dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis regresi terhadap pertumbuhan ekonomi (*growth regression*) dan *growth accounting*. Dengan menggunakan pendekatan pertama, Kementerian PPN/Bappenas menemukan pentingnya proses transformasi struktural, reformasi fiskal, terutama peningkatan rasio pajak, pendalaman pasar keuangan yang digambarkan melalui porsi kredit perbankan terhadap produk domestik bruto yang meningkat, perekonomian yang lebih terbuka, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia. Pemerintah juga menempatkan dua kebijakan, yakni perbaikan iklim investasi serta peningkatan stok infrastruktur, sebagai prioritas pemerintah dalam tiga tahun terakhir.

Kemudian, dengan pendekatan kedua, Kementerian PPN/Bappenas melakukan simulasi kondisi pertumbuhan ekonomi potensial ke depan. Pada skenario *baseline*, tanpa ada perbaikan kebijakan, pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia hingga 2025 akan berada di bawah lima persen. Beberapa kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial ke depan di antaranya peningkatan partisipasi angkatan kerja, peningkatan tingkat pendidikan, peningkatan iklim investasi, dan peningkatan tingkat produktivitas. Pendekatan ketiga yang akan digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah pendekatan yang menjadi tema kuliah umum, yakni *growth diagnostics*. Dengan menggunakan pendekatan *growth diagnostics*, Kementerian PPN/Bappenas dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini dapat mempertajam analisis yang menggunakan dua pendekatan sebelumnya dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan ke depan.

Menteri Bambang menyampaikan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan di antaranya peningkatan belanja publik ke arah yang lebih produktif dan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan yang mendukung perbaikan iklim investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. “Kebijakan pemerintah diarahkan juga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di antaranya melalui *land reform*, pembiayaan untuk UMKM, dan pendidikan vokasi, yang dilakukan dengan pendekatan yang tidak lagi jawa-sentris, tetapi bersifat merata di seluruh belahan Indonesia,” tutur beliau.

Berbagai kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan hasil yang baik, di antaranya perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* dan peningkatan status *investment grade* oleh seluruh lembaga pemeringkat internasional. Kebijakan pemerintah juga mendorong stabilitas makroekonomi yang tercermin dari tingkat inflasi yang rendah, neraca pembayaran yang surplus dan tingkat cadangan devisa yang terus meningkat, serta tingkat rasio utang yang berada pada tingkat yang aman. Setidaknya, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian, yakni sektor manufaktur yang kehilangan daya saing dan ekspor yang menurun, dengan diversifikasi produk yang relatif terbatas. ■

Jakarta, 12 Desember 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
e-mail: humas@bappenas.go.id

Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik
Kementerian PPN/Bappenas
Telepon: (021) 319 34267 ext. 3217
Faksimile: (021) 319 34267
e-mail: winny@bappenas.go.id